

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DI KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG

Yolanda Kartini Dinanti¹⁾, Dr. Supardi, S.Sos.,MSi²⁾, Hj.Helda Fitriani, SPd., M.Si³⁾

*Jurusan Administrasi Negara Fakultas Administrasi Negara,, Sekolah Tinggi/institusi
Kampus : Jln. Sukorejo Sukatani Kenten Telp. (0711) – 826043 Palembang
Email : satyanegarapalembang@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Implementation of Palembang Mayor Regulation Number 76 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of Sukarami District, Palembang City. The aim of the research is to determine the Implementation of Palembang Mayor Regulation Number 76 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures, The research method used is a qualitative method. Data or information, the results of research and analysis show that the implementation of Palembang Mayor Regulation Number 76 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Palembang City Subdistrict at the Sukarami Subdistrict Office, Palembang City has been implemented in accordance with the applicable Mayor's Regulations and is going quite well. This can be seen from communication, resources, disposition, bureaucratic structure, discussions, workshops, education, and training as well as socialization through mass media which has gone quite well in accordance with existing Mayor Regulations, seen from the results of research interviews, from human resources not yet optimally, this is due to a lack of equal training and education for all employees

Keywords : *Implementation and Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures.*

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data atau informasi, Hasil penelitian dan analisis menunjukkan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Palembang di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota yang berlaku dan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, diskusi, workshop, pendidikan, dan pelatihan serta sosialisasi melalui media massa sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Walikota yang ada. dilihat dari hasil wawancara peneliti, dari sumber daya manusia belum optimal hal ini dikarenakan kurangnya latihan dan pendidikan merata untuk seluruh pegawai

Kata Kunci : *Implementasi dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja*

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut serta bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih

dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Dalam Observasi awal Peneliti pada tanggal 21 Februari 2023 terdapat indikasi masalah Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Bab 3 Pasal 4 E tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami kota Palembang, Dalam pelaksanaan administrasi di Kantor Camat Sukarami ini sudah berjalan dengan semestinya. Tetapi didalam pengorganisasian dan koordinasi dengan masyarakat masih belum optimal karena penyampaian maksud dan tujuan camat belum bisa dimengerti oleh beberapa masyarakat dan juga koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan berjalan dengan baik, sehingga berdampak pada kinerja administrasi di Kecamatan Sukarami Tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh suatu perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa masalah Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang

2. Landasan Teori

Pengertian Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildaysky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, adapun Schubert mengemukakan bahwa "Implementasi adalah sistem rekayasa."

Menurut Budi Winarno (2014:147) implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada hakikatnya, implementasi juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program diterapkan. Dalam tataran praktis, implementasi merupakan proses penerapan keputusan dasar. Proses

tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedangkan proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni sebagai berikut.

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pemberdayaan dan hal lain secara rutin.

Van Meter dan Van Horn dalam Ekasari (2014) mengemukakan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Purwanto dalam Syahida (2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu sebagai berikut.

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijaksanaan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya)
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan para pendapat tersebut diatas, penulis menyimpulkan implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan peraturan perundang-undang.

Model Implementasi

Model ini merupakan penganalisaan kebijakan negara dari sudut proses yang lebih deskriptif. Edward II menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar lebih efektif.

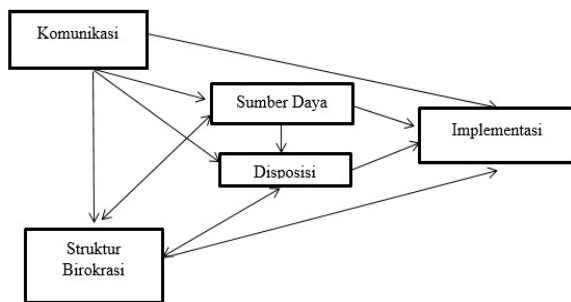
3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Gambar 1
Model Implementasi George Edward III



Sumber: Mulyadi, Deddy, 2018.

Indikator Implementasi

dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu.

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut.

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Jadi dari indikator implementasi diatas, penulis menggunakan model implementasi Teori Van Meter dan Van Horn dikarenakan menurut penulis model teori ini mudah dipahami dan sangat cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang .

Pengertian Kedudukan

Kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah pelaksana tugas kewilayahan. 2 (dua) makna utama dari posisi ini adalah sebagai pembina kewilayahan dan penyelenggara pelayanan masyarakat. Kecamatan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tumbuhnya daya saing daerah sebagai sasaran otonomi daerah, sebagai konsekuensi kebijakan maka kewenangan kecamatan perlu diperluas, antara lain berupa kewenangan penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pelayanan/perijinan, serta kewenangan merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kinerja kecamatan merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kecamatan sebagai lembaga maupun perangkat pelaksanaanya. Kinerja kecamatan juga sebagai dasar bagi Camat untuk penyusunan dan pengelolaan anggaran kecamatan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Tugas dan Fungsi Camat

Tugas Camat Adalah Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan juga Camat mempunyai fungsi sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2016 yaitu.

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

3. Metode Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian yang menjelaskan siapa saja yang dijadikan sampel untuk keperluan penelitian, jenis dan sumber data apakah menggunakan data primer ataupun sekunder, kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data, dan terakhir analisis data, dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019:2).

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tentang Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Implementasi Perwako Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil karena lebih efektif terhadap pemberian gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif objek dapat diteliti serta digambarkan dengan lebih detail dan jelas.

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Sugiyono, 2013:96). Dimana peneliti memilih informan penelitian yang peneliti anggap

mengetahui bagaimana kondisi fungsi administratif Kantor Camat Sukarami Kota Palembang. Adapun yang menjadi informan penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 3
Informan Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Camat sukarami	1 Orang
2	Sekretaris camat	1 Orang
3	Kasubbag umum dan kepegawain	1 Orang
4	Kasi pembangunan masyarakat kelurahan	1 Orang
5	Tokoh masyarakat	1 Orang
	Jumlah	5 Orang

Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019:296). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proposal penelitian ini, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

i. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan melaksanakan serangkaian kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus bab 3 Pasal 4e).

ii. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

iii. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan tatap wajah antara narasumber dan peneliti guna untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan informasi yang akurat secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus bab 3 Pasal 4e).

iv. Dokumentasi

dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus bab 3 Pasal 4e).

Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian adalah langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih, sehingga memudahkan peneliti melihat apa yang sudah terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Penarikan kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara

- memikir ulang selama penulisan,
- tinjauan ulang catatan lapangan,
- tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif,
- upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

4. Hasil dan Pembahasan

Sumber daya manusianya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk membuat rancangan aktualisasi yang didasarkan atas isu-isu pokok yang muncul pada unit kerja penulis di Kecamatan Sukarami Kota Palembang Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Salah satu Core Issue yang muncul adalah "Pemanfaatan Sosial

Media Mengenai Program Yang Telah Terlaksana Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan". Isu tersebut akan dianalisa berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dikaitkan dengan mata pelajaran Agenda II yaitu Nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan Keterkaitan dengan mata pelajaran Agenda III yaitu Kedudukan ASN dalam NKRI.

Belum adanya publikasi program unggulan organisasi yang telah terlaksana oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) membuat tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi tentang program atau kegiatan organisasi tersebut. Organisasi harus bisa mengikuti pesatnya perkembangan media agar program dan kegiatan organisasi dapat tersalurkan dan bisa lebih terpublikasikan ke masyarakat dengan baik. Agar tercapainya wadah informasi bagi masyarakat penulis membuat rancangan aktualisasi yang hasilnya berupa channel youtube yang berisi konten video program atau kegiatan organisasi yang telah terlaksana, di manipulasi sedemikian rupa sehingga tampilan video tersebut menjadi bagus, menarik dan layak dipertontonkan ke publik. Video yang akan dibuat yaitu tentang Bank Sampah Pelangi yang terdapat di Kelurahan Sukodadi. Bank Sampah Pelangi dibentuk oleh Seksi PMK di bawah binaan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang, Camat Sukarami, Lurah Sukodadi dan RT Sukodadi. Bank Sampah pelangi telah berdiri selama 3 tahun dengan wilayah pelayanan lingkungan sekitar dan bentuk organisasi kelompok swadaya masyarakat. Proses operasional bank sampah pelangi dimulai dari penyeteroran sampah oleh nasabah, Sampah yang bisa disetor yaitu plastik, kertas, besi, elektronik dan semua sampah yang bisa didaur ulang. Setelah nasabah menyetorkan sampah, sampah tersebut ditimbang dan dicatat nilai rupiahnya kedalam buku tabungan nasabah oleh pengurus kemudian nasabah bisa pulang dan menghitung penghasilan berdasarkan catatan dibuku tabungan.

Dengan demikian, rancangan aktualisasi diharapkan dapat membantu penulis sebagai peserta latsar melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dengan baik sebagai pemecahan isu atau masalah di unit kerja penulis. Sehingga penulis dapat melaksanakan aktualisasi saat kegiatan habituasi dan melaporkannya dalam bentuk seminar pelaksanaan aktualisasi untuk selanjutnya dapat menjadi PNS yang Profesional sebagai pelayanan masyarakat.

Deskripsi Organisasi

Kecamatan Sukarami Kota Palembang terletak di pinggir Kota Palembang yang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dengan luas wilayah 5 145,90 Ha. Adapun 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yaitu Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan

Sukarami, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Talang Betutu, Kelurahan Sukodadi dan Kelurahan Talang Jambe. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukarami Kota Palembang berjumlah 32,33 jiwa per Ha (hektare), dimana Kelurahan Sukajaya memiliki kepadatan penduduk terbesar dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kecamatan Sukarami Kota Palembang yaitu 100,33 jiwa per hektare. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, semua kelurahan di Kecamatan Sukarami Kota Palembang adalah termasuk desa swasembada dimana setiap Kelurahan memiliki kantor kelurahan di wilayah masing-masing.

Kecamatan Sukarami Kota Palembang saat ini memiliki 70 Rukun Warga (RW), 387 Rukun Tetangga (RT) dan 49.264 Keluarga yang terbagi dalam 7 Kelurahan yaitu: Kelurahan Sukabangun berjumlah 7 Rukun Warga (RW), 48 Rukun Tetangga (RT), 5.502 Keluarga, Kelurahan Sukajaya berjumlah 10 Rukun Warga (RW), 108 Rukun Tetangga (RT), 12.958 Keluarga, Kelurahan Sukarami berjumlah 13 Rukun Warga (RW), 49 Rukun Tetangga (RT), 5.901 Keluarga, Kelurahan Kebun Bunga berjumlah 14 Rukun Warga (RW), 74 Rukun Tetangga (RT), 9.596 Keluarga, Kelurahan Talang Betutu berjumlah 14 Rukun Warga (RW), 41 Rukun Tetangga (RT), 6.400 Keluarga, Kelurahan Sukodadi berjumlah 6 Rukun Warga (RW), 34 Rukun Tetangga (RT), 5.259 Keluarga, dan Kelurahan Talang Jambe berjumlah 6 Rukun Warga (RW), 33 Rukun Tetangga (RT), 3.648 Keluarga.

Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang, baik negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2015/2017 sebanyak 36 sekolah TK, 27 Sekolah Dasar (SD), 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 14 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 15 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sarana pendidikan negeri dan swasta tersebut digunakan oleh sejumlah murid sekolah negeri dan swasta yang mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun. Kecamatan Sukarami Kota Palembang memiliki juga sarana pendidikan binaan Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 3 Madrasah Aliyah (MA). Selain sarana pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sukarami Kota Palembang, seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin/rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, dan puskesmas pembantu, pada tahun 2017 masing-masing berjumlah 5 unit, 13 unit, 10 unit, 3 unit, 6 unit. Sedangkan praktek dokter, praktek bidan, posyandu/ polindes, apotik, dan toko obat pada tahun 2017 masing-masing 40 unit, 47 unit, 64 unit, 21 unit, dan 33 unit.

Identifikasi Isu

Dalam identifikasi Isu Aktual, penulis terlebih dahulu melakukan konsultasi dalam bentuk diskusi guna meminta masukan dari Mentor mengenai Uraian dan Tugas di Kecamatan Sukarami Kota Palembang khususnya di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang menjadi tempat bertugas penulis. Aspek utama dalam mencari isu adalah adanya permasalahan, kekurangan atau tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berikut isu-isu hasil konsultasi dan diskusi dengan Mentor sebagai berikut :

KOMUNIKASI ANTARA PIMPINAN DAN BAWAHAN TERKAIT DENGAN MANAGEMEN ASN

Deskripsi Isu : Dalam melakukan komunikasi antar pimpinan dan bawahan terkait manajemen ASN pada Kantor Camat Sukarami. Setiap ASN harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang, dimana seluruh ASN harus komunikasi dengan baik mau atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan. Setiap ASN keluar kantor harus izin atasan dan ASN harus bekerja dengan porsi masing-masing.

1.2

SUMBER DAYA MANUSIA YANG ADA DI KECAMATAN SUKARAMI

Identifikasi Isu : Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Sukarami dibina diberi masukan dimana ASN harus mengetahui pekerjaan yang telah ditetapkan analisis jabatan masing-masing dan mereka di beri pelatihan dan pembinaan dengan sosialisasi.

SIKAP PEGAWAI KECAMATAN SUKARAMI DALAM MELAKUKAN PELAYANAN

Deskripsi Isu: ASN yang membidangi pelayanan di kantor camat sukarami harus bersikap baik dan fleksibel dimana masyarakat yang ingin berurusan dilayani dengan sebaik mungkin.

KEJELASAN STRUKTUR ORGANISASI SERTA VISI MISI CAMAT SUKARAMI

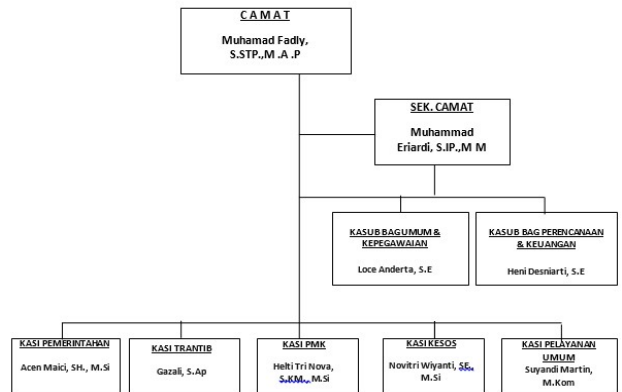
Berikut Ini Struktur Organisasi Kantor Camat Sukarami:

- Camat : Muhamad Fadly, S.STP.,M.A.P
- Sekretaris Camat : Muhammad Eriardi, S.IP.,MM
- Kasubbag umum & kepegawaian : Loce Anderta, S.E
- Kasubbag perencanaan & keuangan : Heni Desniarti, S.E
- Kasi Pemerintahan : Acen Maici, SH., M.Si
- Kasi Setentrman dan Ketertiban : Gazali, S.Ap
- Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan : Helti Tri Nova, S.KM., M.Si
- Kasi Kesejahteraan Sosial : Novitri Wiyanti, SE., M.Si
- Kasi Pelayanan Umum : Suyandi Martin, M.Kom
- Lurah Sukajaya : Abu Huzaipah, S.H

- Lurah Kebun Bunga : Adriansyah, S.IP., M.Si
- Lurah Sukabangun : Deni Akbar, S.IP
- Lurah Sukodadi : Rahmat Ginanjar, S.IP., M.Si
- Lurah Talang Jambe : Asrahuddin, SE., M.Si
- Lurah Talang Betutu : Dian Pradana Putra, SE., MM
- Lurah Sukarami : Yhon Hapi, SH., M.Si

Struktur Organisasi Camat Sukarami

Gambar 7



5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada bulan Juli 2023. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berkompeten. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Bapak Muhammad Eriardi, S.IP.,MM selaku Sekertaris Camat Sukarami kota Palembang, Ibu Bapak Loce Anderta, S.E selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, Ibu Helti Trinova, S.KM.,MSi selaku Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, Ibu Arma Nurzah selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukarami.

Hasil penelitian ini sesuai dengan George. C. Edward dalam Mulyadi (2018:68-69) tentang teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya, penulis juga akan melampirkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari narasumber yang mengetahui, memahami dan memiliki hubungan dengan penelitian yan dijalankan oleh peneliti.

Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Bab 3 Pasal 4e) A. Implementasi

Sebagaimana secara singkat telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa George C. Edward III ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

yakni, komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

B. Komunikasi

Komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuatan keputusan sudah mengetahui apa yang akan di kerjakan. Selain dari itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat dan akurat. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan atau implementor konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang di terapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa komunikasi yang berjalan di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang telah dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan yang ada di kantor tersebut.

C. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Sukarami Kota

Palembang. Pada dasarnya sumber daya fasilitas mempengaruhi sumber daya manusia dalam budayanya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang belum cukup atau tidak sesuai dengan struktur organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut kualitas sumber daya manusia yaitu para pegawai Aparatur Sipil di kantor tersebut juga masih rendah. Pengetahuan atau wawasan yang belum luas termasuk mengenai Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016.

Kemudian untuk sumber daya fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang sudah memadai. Hal ini di lihat dari fasilitas yang ada sudah bertambah. Namun terkadang masih adanya kendala seperti komputer yang tiba-tiba tidak dapat di hidupkan

D. Disposisi

Variabel yang ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana kegiatan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana harus memiliki sikap positif dan ingin mendukung suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan menerima setiap kebijakan atau peraturan yang ada dengan baik dan tanpa paksaan. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Sukarami Palembang dengan sadar mematuhi setiap kebijakan atau peraturan yang ada di kantornya.

E. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Sumber-sumber untuk melaksanakan kegiatan atau implementor kebijakan mengetahui dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan struktur birokrasi atau Standar Operasional Prosedur. Dalam hal ini struktur

birokrasi yang dimaksud penulis adalah Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa struktur birokrasi di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang telah di tetapkan. Pada hakikatnya struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Pengembangan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Bab 3 Pasal 4e)

A. Workshop

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kegiatan workshop di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada para pegawai sesuai dengan bidang profesinya melalui pelatihan. Kegiatan workshop ini juga dapat memberikan dan meningkatkan tugas dan fungsi serta kualitas diri seorang pegawai.

B. Pendidikan dan Pelatihan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pendidikan dan pelatihan di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan pemerintahan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian organisasi. Manfaat pendidikan dan pelatihan bagi Kantor Camat Sukarami Kota Palembang, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, menciptakan sikap, loyalitas dan kerja sama sesama pegawai.

C. Diskusi

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai diskusi di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang bertujuan untuk mencari kesepahaman atau kesepakatan pendapat atau gagasan. Diskusi juga dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan sebuah pengalaman. Diskusi merupakan salah satu kegiatan pidato. Diskusi adalah pertukaran pikiran, ide, dan pendapat secara verbal anatar dua orang atau lebih. Manfaat diskusi untuk di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang yaitu, untuk saling menghargai pendapat orang lain, dapat menahan ego yang ada di dalam diri, dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan

D. Pelatihan di kantor sendiri

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelatihan di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan pemerintahan kota Palembang. Pelatihan di kantor sendiri juga untuk memberikan keyakinan dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggara pemerintah di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang. Dengan adanya pelatihan di kantor sendiri diharapkan pegawai dapat memahami dan bertambahnya wawasan dan pengetahuan terkait dengan Pengembangan Budaya Kerja di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informasi dan dokumentasi peneliti Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi George C. Edward III maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian belum tercapai secara optimal yang terbukti hingga tahun 2020 ini masih ditemukannya beberapa kendala pada 5 variabel. Rendahnya kinerja Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang sudah baik, terbukti dengan berjalannya Program Pengembangan karir yang di ikuti 23 peserta dari pegawai Kecamatan Sukarami Kota Palembang, namun demikian masih ada pegawai yang tidak bisa mengikuti pelatihan dikarenakan kurangnya dukungan waktu untuk mengikuti pelatihan,
2. Standar dan Sasaran Kebijakan Pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang sudah dirumuskan secara jelas dan tegas. Akan tetapi dalam Implementasinya, tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut hanya diketahui oleh pihak atasan saja, sedangkan para staf dibawahnya sama sekali tidak mengetahui peraturan tersebut. Oleh karena itu, kinerja kebijakan yang optimal sulit diperoleh akibat standar dan sasaran kebijakan yang belum dapat diketahui secara jelas dan terukur oleh seluruh ASN Kantor Camat Sukarami Kota Palembang selaku pelaksana.
3. Sumber daya ASN dan Honorer Kantor Camat Sukarami Kota Palembang masih kekurangan SDM dibidang IT (Informasi dan Teknologi), sehingga inilah yang menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan implementasi peraturan tersebut. Sedangkan dari segi sumberdaya non manusia, seperti komputer dan lain-lain untuk menunjang Pelayanan tersebut, dan masih memiliki kendala yaitu finansial atau anggaran yang digunakan untuk memenuhi perlengkapan operasional lainnya.
4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Kondisi sosial masyarakat di sekitar kecamatan sukarami tidak terlalu berpengaruh langsung terhadap jalannya kebijakan karena tidak semua masyarakat disana yang memiliki kondisi social, ekonomi dan politik yang sudah baik.
5. Disposisi Implementor Dalam hal ini, diperoleh kendala pada pemahaman atau kognisi para staff di Kantor camat sukarami yang juga bertindak selaku pelaksana kegiatan. Para staff yang ada di Kantor camat sukarami sebagian besar kurang memahami Peraturan akibat belum pernah melihat peraturan.

Apabila dilihat dari secara keseluruhan variabel yang dikemukakan Van George C. Edward III maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang belum dilaksanakan sesuai dengan isi peraturan tersebut oleh Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sehingga wajar saja tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran saran yang diharapkan dapat membawa pelaksanaan tugas Kecamatan Sukarami Kota Palembang ke arah yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini. Saran saran tersebut antara lain :

- 1 Memberikan sosialisasi kepada seluruh ASN dan Honorer dengan menyampaikan keseluruhan isi Peraturan, serta melakukan sosialisasi serta penyebaran informasi yang luas kepada masyarakat sekitar terutama yang berada di Kecamatan Sukarami Kota Palembang terhadap keberadaan Kantor Camat Sukarami selaku pihak yang bertanggung jawab atas segala kendala ataupun masalah terutama di dalam administrasi di wilayah tersebut, mulai dari tujuan dan sasaran kebijakan hingga kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kecamatan Sukarami Kota Palembang tersebut.
- 2 Kekurangan sumberdaya manusia yang berkompeten di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang ini bisa diantisipasi dengan melakukan pelatihan terhadap ASN dan Tenaga Honorer Sebagai tenaga Teknis di bidangnya masing-masing dan teknisi dan melakukan penyeleksian bagi orang-orang yang berkompeten. Selain itu, bisa dilakukan pengrekrutan tenaga sesuai dengan latar belakang keahlian atau bidang lulusan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di Kantor Camat Sukarami Kota Palembang.
- 3 Kemudian, untuk kekurangan anggaran untuk operasional kegiatan pelayanan Masyarakat dan pelatihan Tenaga ASN dan Honorer pemerintah Kota Palembang harus dapat memenuhi dan tidak mengurangi anggaran yang semestinya.

Sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung operasional tersebut.

- 4 Memberikan pemahaman kepada ASN dan Tenaga Honorer untuk lebih meningkatkan kontribusinya selaku pihak yang bertanggung jawab atas wilayahnya agar sasaran dari peraturan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*.
Surakarta : Pustaka Cakra

Ella. Sagala Jauvani dan Rivai Veithzal. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia..*

Flippo, Edwin B. 1995. *Manajemen Personalialia*. Edisi VI.
Jakarta: Erlangga

Gomes. Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:
Andi

Mokodompit, Muliadi. 2023. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Mustanir, Ahmad. 2022. *Pelayanan Publik*, Jawa Timur :
CV. Penerbit Qiara Media.

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta : UNISRI Press.

Hariandja., T.E Marihot. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
Grasindo

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*,
Yogyakarta : Alfabeta
2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Sumber Lain :

Nuzul Fitra Salam. 2018. "Kedudukan Dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 5 No.2 Oktober 2018, 1314.

Supardi, dkk. 2022. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*, Palembang : STIA Satya Negara.

Wahyudi Kumorotomo, 2008, "Pengembangan e-Government Untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik", Jogjakarta : Universitas Gajah Mada.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Walikota Palembang No. 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja di Kecamatan Kota Palembang.

Sumber Internet :

https://carapedia.com/pengertian_definisi_publik_info2104.html, di akses pada tanggal 23 Februari 2023

<https://dailysocial.id/post/implementasi>, di akses pada tanggal 23 Februari 2023

<http://repository.untag-sby.ac.id/1569/2/Bab%20II.pdf>, di akses pada tanggal 22 Februari 2023

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/28171/perwali-kota-palembang-no-76-tahun-2016>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023